ANALISIS TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (TAN)

DALAM KASUS FEMISIDA DI HONDURAS

PADA TAHUN 2018-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

NURUL FAJRI SALSABILA

21323307

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

ANALISIS TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (TAN)

DALAM KASUS FEMISIDA DI HONDURAS PADA TAHUN 2018-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

NURUL FAJRI SALSABILA

21323307

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (TAN)

DALAM KASUS FEMISIDA DI HONDURAS

PADA TAHUN 2018-2024

Oleh :

Nurul Fajri Salsabila
(21323307)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

3 September 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A.	
2. Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.	
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Selasa, 19 Agustus 2026



Nurul Fajri Salsabila

DAFTAR ISI

SKRIPSI **1**
DAFTAR ISI **5**
DAFTAR BAGAN **6**
DAFTAR SINGKATAN **7**
ABSTRAK **8**
BAB 1
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Cakupan Penelitian 5
1.5 Tinjauan Pustaka 6
1.6 Kerangka Pemikiran 8
1.7 Argumen Sementara 11
1.8.1 Jenis Penelitian 12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 13
1.8.4 Proses Penelitian 13
BAB II **15**
2.1 Aktor dalam Jaringan Advokasi Femisida di Honduras 15
2.2 Boomerang Pattern dalam kasus femisida 22
BAB III **28**
3.1 Taktik Advokasi dalam Jaringan TAN Isu Femisida di Honduras 2018 - 2024 28
3.1.1 Information Politics (Politik Informasi) 28
3.1.2 Symbolic Politics (Politik Simbolik) 33
3.1.3 Leverage Politics (Politik Pengungkit) 36
3.1.4 Accountability Politics (Politik Akuntabilitas) 39
3.2 Tahapan Pengaruh Jaringan Advokasi Transnasional 42
BAB IV **47**
4.1 Kesimpulan 47
4.2 Rekomendasi 49
Daftar Pustaka 50

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. *Boomerang pattern*……24

DAFTAR SINGKATAN

CDM	:	Centro de Derechos de Mujeres
CEDAW	:	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CEM-H	:	Centro de Estudios de la Mujer-Honduras
HAM	:	Hak Asasi Manusia
UPR	:	Universal Periodic Review
IACHR	:	Inter-American Commission on Human Rights
IUDPAS-UNAH	:	Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad – Universidad Nacional Autónoma de Honduras
LGBTI	:	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex
ODHM	:	Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
TAN	:	Transnational Advocacy Network
UN Women	:	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UUSC	:	Unitarian Universalist Service Committee

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran jejaring advokasi dalam merespons krisis femisida di Honduras pada periode 2018-2024. Femisida di Honduras tidak hanya dipahami sebagai tindak kriminal individual, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan, terbatasnya akses layanan, dan belum kuatnya respons negara. Penelitian ini menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Network* dari Keck and Sikkink untuk menganalisis peran jejaring dalam membangun advokasi, menggunakan pola *boomerang,* serta menggunakan taktik advokasi untuk menekan pemerintah Honduras. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka, laporan organisasi, dokumen HAM internasional, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring berperan dalam mengolah data menjadi informasi politik, membingkai femisida sebagai isu HAM, memanfaatkan forum internasional seperti CEDAW dan UPR, serta menagih akuntabilitas negara. Namun, pengaruh jejaring masih lebih terlihat kuat pada pembentukan isu, perubahan wacana, dan dorongan kebijakan, sementara perubahan perilaku negara masih belum signifikan.

Kata-kata kunci: Jejaring advokasi, femisida, Honduras, *Transnational Advocacy Network,* pola *boomerang*.

ABSTRACT

The role of advocacy networks in addressing Honduras' femicide epidemic between 2018 and 2024 is examined in this study. In Honduras, femicide is viewed as a type of gender-based violence linked to poor state response, weak protective mechanisms, and restricted access to resources, in addition to being a single criminal crime. Using the boomerang pattern and advocacy strategies to put pressure on the Honduran government, this study analyzes the function of advocacy networks in constructing advocacy efforts using Keck and Sikkink's Transnational Advocacy Network framework. Thru an examination of the literature, organizational reports, international human rights documents, and secondary data, the study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach.The results show that advocacy networks are involved in framing femicide as a human rights issue, using international venues like CEDAW and the UPR, demanding state accountability, and turning data into political information. Significant shifts in state conduct have not yet been seen, but these networks' influence is still more noticeable in issue development, discursive transformation, and policy lobbying.The results show that advocacy networks are involved in framing femicide as a human rights issue, using international venues like CEDAW and the UPR, demanding state accountability, and turning data into political information. Significant shifts in state conduct have not yet been seen, but these networks' influence is still more noticeable in issue development, discursive transformation, and policy lobbying.

***Keywords** : Advocacy networks, femicide, Honduras, Transnational Advocacy Network, boomerang pattern*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Femisida di Honduras merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terus menjadi persoalan serius dalam perlindungan hak perempuan. Kasus femisida tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kekerasan terhadap individu, karena persoalan ini juga berkaitan dengan kondisi sosial, hukum, dan kelembagaan yang mempengaruhi keselamatan perempuan. Ketimpangan gender, hambatan dalam proses hukum, dan impunitas yang masih kuat membuat isu femisida terus muncul sebagai perhatian kelompok-kelompok yang bergerak dalam advokasi hak perempuan (Menjívar and Walsh 2017).

Honduras termasuk salah satu negara yang memiliki femisida tinggi di kawasan Amerika Latin, sekaligus salah satu yang paling minim capaian dalam penanganannya. Tingginya angka femisida di Honduras berkaitan dengan adanya hambatan struktural dalam sistem hukum dan institusi negara. Di Honduras impunitas masih menjadi persoalan mendasar, proses hukum atas kasus yang tidak berujung pada penyelidikan yang tuntas maupun putusan yang menjerakan, sehingga pelaku jarang mendapat konsekuensi hukum yang sepadan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan di Honduras tetap menunjukkan kondisi yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan data juga memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya mengalami penurunan yang konsisten. Pada 2018, tingkat kematian perempuan akibat pembunuhan di Honduras mencapai 7,8 kasus per 100.000 perempuan (World Bank 2023, 12). Sementara itu, Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (Pusat

Pemantauan HAM Perempuan) mencatat sebanyak 278 perempuan dibunuh pada 2020 dan masih mencatat 231 kasus pada 2024 (Centro de Derechos de Mujeres 2024). Meskipun jumlah tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun, keberlangsungan kasus hingga 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dan belum sepenuhnya dapat ditangani secara optimal.

Kondisi tersebut membuat femisida di Honduras dipandang sebagai krisis yang memerlukan respons lebih dari satu pihak. Penanganan yang tidak optimal di tingkat domestik mendorong berbagai kelompok masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam menyampaikan informasi, mengangkat perhatian publik, dan menuntut tanggung jawab negara. Berbagai organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga HAM bekerja untuk memperlihatkan bahwa femisida tidak bisa dibiarkan menjadi persoalan yang dianggap normal (CIVICUS 2024).

Dalam merespons isu tersebut, berbagai aktor bergerak melalui hubungan yang saling terhubung. Ada organisasi perempuan yang fokus pada dokumentasi dan pendampingan, ada kelompok masyarakat sipil yang membangun kampanye, ada jaringan solidaritas yang memperkuat advokasi, dan ada forum internasional yang menjadi ruang penyampaian tuntutan. Situasi ini menunjukkan bahwa respons terhadap femisida di Honduras berlangsung melalui kerja bersama banyak aktor, bukan melalui satu organisasi saja (IM-Defensoras 2017).

Dalam menghadapi persoalan femisida, organisasi perempuan di Honduras juga menghadapi berbagai hambatan dalam mendorong perubahan melalui jalur domestik. Hambatan tersebut terlihat dari lemahnya respons terhadap tuntutan

perlindungan perempuan, tingginya impunitas dalam penanganan kasus, serta belum optimalnya proses pertanggungjawaban terhadap pelaku. Kondisi tersebut membuat berbagai tuntutan yang disampaikan organisasi masyarakat sipil tidak selalu diikuti oleh perubahan yang memadai dalam penanganan femisida. Keterbatasan respons domestik kemudian mendorong organisasi perempuan untuk memanfaatkan ruang advokasi yang lebih luas, termasuk forum internasional, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perhatian dan tekanan terhadap pemerintah Honduras (Centro de Derechos de Mujeres 2024).

Salah satu kondisi yang menunjukkan keterbatasan respons pemerintah Honduras dapat dilihat dari perubahan kebijakan terkait hukuman bagi pelaku femisida. Honduras sebelumnya telah mengatur kriminalisasi femisida secara eksplisit melalui Legislative Decree No.23 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 30 hingga 40 tahun penjara. Namun, perubahan kebijakan pada tahun 2018 menurunkan rentang hukuman tersebut menjadi 20 hingga 30 tahun penjara (Herrera 2020). Perubahan tersebut menimbulkan persoalan karena dilakukan di tengah kondisi femisida yang masih serius dan tuntutan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan untuk memperkuat penanganan femisida dengan respons kebijakan yang diberikan oleh negara.

Keberlanjutan persoalan tersebut kemudian mendorong organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil untuk membangun kerja sama serta memanfaatkan berbagai ruang advokasi di luar tingkat domestik. Keterhubungan tersebut memungkinkan isu femisida memperoleh perhatian yang lebih luas dan

menjadi bagian dari tuntutan terhadap pemerintah Honduras (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan femisida di Honduras tidak hanya berkaitan dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga dengan bagaimana keterbatasan penanganan di tingkat domestik mendorong berkembangnya berbagai bentuk advokasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana aktor-aktor masyarakat sipil membangun keterhubungan dan memanfaatkan ruang advokasi yang lebih luas dalam merespons persoalan femisida serta mendorong perubahan terhadap pihak yang menjadi sasaran advokasi.

Penelitian ini melihat perlu kajian yang lebih jauh mengenai bagaimana aktor-aktor non-negara di Honduras merespons kelemahan penanganan femisida di tingkat domestik, dan bagaimana keterhubungan mereka dalam membentuk tekanan terhadap negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TAN). Dalam TAN aktor-aktor yang memiliki perhatian terhadap isu yang sama saling terhubung melalui pertukaran informasi, kerja sama, dan penyampaian tuntutan kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi (Keck and Sikkink 1998, 10-11).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana jejaring advokasi berperan dalam krisis femisida di Honduras tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan krisis femisida di Honduras pada tahun 2018-2024.
2. Menganalisis bagaimana jejaring advokasi transnasional bekerja dalam merespons krisis femisida di Honduras tahun 2018-2024.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada jejaring advokasi transnasional dalam merespons krisis femisida di Honduras. Honduras dipilih karena femisida masih menjadi persoalan kekerasan berbasis gender yang berlangsung secara berkelanjutan (Hanif, Eriyanti, and Prabhawati 2025).

Penelitian mencakup periode 2018-2024. Pada 2018 tercatat 383 kasus dan relatif stagnan pada 2019 dengan 380 kasus. Jumlah tersebut menurun menjadi 278 kasus pada 2020, kemudian meningkat menjadi 342 pada 2021, turun menjadi 297 pada 2022, dan kembali meningkat hingga mencapai jumlah tertinggi pada 2023 dengan 386 kasus, sebelum turun menjadi 231 kasus pada 2024 (Centro de Derechos de Mujeres).

Tahun 2018 dipilih sebagai titik awal karena adanya perubahan pengaturan femisida melalui *Criminal Code,* termasuk perubahan hukuman menjadi 20-30 tahun penjara (Herrera 2020). Periode penelitian diakhiri pada 2024 karena data tahun setelahnya belum seluruhnya tersedia dan terkonsolidasi, sehingga 2018-2024 dipilih agar perkembangan jejaring advokasi dapat dianalisis secara konsisten.

Selain dibatasi berdasarkan periode dan lokasi penelitian, penelitian ini juga membatasi fokus pada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses advokasi

femisida di Honduras, khususnya organisasi perempuan dan masyarakat sipil seperti Centro de Derechos de Mujeres (Pusat Hak-Hak Perempuan), Cattrachas, dan aktor terkait lainnya. Aktor internasional serta mekanisme advokasi seperti UPR dan CEDAW dibahas sejauh keterlibatannya dalam mendukung proses advokasi, sedangkan pemerintah Honduras ditempatkan sebagai pihak yang menjadi sasaran tuntutan dan tekanan advokasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai femisida dan advokasi transnasional telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, terutama yang menyoroti gerakan sosial, peran lembaga internasional, serta respons terhadap kekerasan berbasis gender. Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan landasan untuk melihat posisi penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Karina Utami Dewi, Hangga Fathana, dan Masitoh Nur Rohma dalam artikel berjudul "*Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia*" yang dimuat dalam JAS (Journal of ASEAN Studies) pada 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan anti-kekerasan seksual di Indonesia merupakan bagian dari jaringan advokasi transnasional. Penulis menjelaskan adanya *boomerang pattern*, keterlibatan *political entrepreneur*, serta hubungan dengan aktor internasional dalam membentuk tekanan terhadap isu kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan penggunaan empat taktik TAN, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Meskipun penelitian ini memberikan kerangka analitis yang kuat, fokus kajiannya masih berada pada konteks Indonesia dan belum membahas femisida di Honduras (Dewi, Fathana, and Rohma 2023).

Penelitian kedua dilakukan oleh M. Rayhan Hanif, Linda Dwi Eriyanti, dan Adhiningasih Prabhawati dalam artikel berjudul "*Addressing Femicide in Honduras through the Spotlight Initiative: A Study of the Implementation of the UN–EU Global Program*" yang diterbitkan dalam SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak pada 2025. Penelitian ini membahas upaya PBB dan Uni Eropa dalam menangani femisida di Honduras melalui *Spotlight Initiative*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan, institusi, layanan responsif gender, data, dan gerakan perempuan. Namun, implementasinya dinilai belum sepenuhnya memenuhi indikator pengarusutamaan gender. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus utamanya yang masih menempatkan program internasional sebagai pusat analisis, sementara peran organisasi lokal belum dibahas secara mendalam (Hanif, Eriyanti, and Prabhawati 2025)

Penelitian ketiga yang relevan adalah artikel "*The Architecture of Femicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras*" yang ditulis oleh Cecilia Menjívar and Shannon Drysdale Walsh dan diterbitkan dalam Latin American Research Review pada 2017. Artikel ini membahas femisida di Honduras dengan menekankan peran negara, ketimpangan sosial, serta kekerasan gender sehari-hari yang membentuk situasi rentan bagi perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual, melainkan juga sebagai hasil dari kegagalan negara dan struktur ketimpangan yang terus berlangsung. Walaupun artikel ini penting untuk memahami konteks struktural femisida di Honduras, pembahasannya belum

menyoroti secara khusus peran organisasi masyarakat sipil dalam merespons isu tersebut (Menjívar and Walsh 2017).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian sebelumnya telah membahas femisida, kekerasan berbasis gender, dan advokasi transnasional dari berbagai sudut pandang. Namun, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis bagaimana *Transnational Advocacy Network* (TAN) bekerja dalam kasus femisida di Honduras pada periode 2018-2024, terutama dalam melihat hubungan antara aktor domestik dan internasional di dalam jaringan tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink untuk menjelaskan bagaimana jaringan aktor bekerja dalam memperjuangkan suatu isu melalui hubungan lintas negara. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *Transnational Advocacy Network* merupakan jaringan yang terbentuk dari berbagai aktor yang memiliki perhatian terhadap suatu isu berdasarkan nilai atau prinsip tertentu. Dalam jaringan ini, aktor tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berhubungan melalui pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan penyampaian tuntutan kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi. Aktor dalam TAN dapat berasal dari organisasi masyarakat sipil, kelompok sosial, media, organisasi internasional, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap isu yang diperjuangkan (Keck and Sikkink 1998, 17).

Dalam penelitian ini, konsep TAN digunakan untuk melihat bagaimana krisis femisida di Honduras tahun 2018-2024 mendorong hubungan antara berbagai

aktor domestik dan internasional dalam proses advokasi. Penelitian ini tidak memandang respons terhadap femisida sebagai tindakan satu organisasi saja, tetapi sebagai proses dalam sebuah jaringan yang melibatkan organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, media, organisasi internasional, lembaga HAM, serta aktor negara. Hubungan antar aktor tersebut menjadi fokus penelitian untuk melihat bagaimana suatu isu domestik dapat dibawa ke ruang advokasi yang lebih luas (Keck and Sikkink 1998, 17).

Salah satu mekanisme kerja dalam TAN adalah *boomerang pattern*. Pola ini muncul ketika saluran komunikasi antar negara dan aktor domestik terblokir, aktor domestik mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan pada negara mereka dari luar.

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *boomerang pattern* terjadi ketika aktor domestik mengalami hambatan dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintahnya sendiri. Dalam kondisi tersebut, aktor domestik membangun hubungan dengan aktor internasional untuk memperoleh dukungan. Dukungan tersebut kemudian digunakan untuk membawa kembali tuntutan kepada pemerintah melalui tekanan dari jaringan eksternal (Keck and Sikkink 1998, 20).

Dalam penelitian ini, *boomerang pattern* digunakan untuk menganalisis bagaimana isu femisida di Honduras bergerak dari tingkat domestik menuju tingkat internasional. Analisis tidak hanya melihat keberadaan data mengenai femisida, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, disusun, dan disebarkan melalui laporan, publikasi, kampanye, maupun forum internasional sebagai bagian dari proses advokasi jaringan (Keck and Sikkink 1998, 21).

Selain *boomerang pattern*, penelitian ini menggunakan strategi advokasi dalam TAN, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Strategi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana jaringan menghasilkan dan menyebarkan informasi, membangun perhatian terhadap isu, memperoleh dukungan dari aktor lain, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menjadi sasaran advokasi (Keck and Sikkink 1998, 24).

Dalam jejaring advokasi femisida di Honduras, Centro de Derechos de Mujeres (Pusat Hak-Hak Perempuan) dianalisis sebagai salah satu aktor yang memiliki posisi sebagai *political entrepreneur*. Posisi ini dipahami dalam kerangka TAN sebagai fungsi aktor yang mampu mengangkat suatu isu, menghasilkan informasi, dan menghubungkan berbagai pihak dalam jaringan advokasi. Namun, CDM tidak ditempatkan sebagai aktor tunggal dalam penelitian ini, melainkan sebagai bagian dari jejaring advokasi transnasional yang bekerja bersama aktor lain dalam merespons krisis femisida di Honduras (Keck and Sikkink 1998, 22).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana jejaring advokasi transnasional bekerja dalam merespons krisis femisida di Honduras tahun 2018-2024. Analisis penelitian berfokus pada hubungan antar aktor dalam jaringan, mekanisme kerja TAN, strategi advokasi yang digunakan, serta tahapan pengaruh dalam jejaring tersebut (Keck and Sikkink 1998, 13).

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa krisis femisida di Honduras pada tahun 2018-2024 tidak ditangani oleh satu organisasi saja, melainkan melalui kerja jejaring advokasi transnasional yang melibatkan organisasi perempuan,

kelompok masyarakat sipil, lembaga HAM, dan aktor internasional (Keck and Sikkink 1998). Jaringan tersebut bekerja melalui pertukaran informasi, pembingkaian isu, dan tekanan lintas batas untuk mendorong perhatian terhadap femisida sebagai persoalan yang terus berulang di Honduras (Menjívar and Walsh 2017).

Penelitian ini berargumen bahwa jaringan advokasi menggunakan empat taktik TAN. Melalui *information politics*, jaringan mengolah data femisida serta laporan kekerasan terhadap perempuan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menekan negara. Melalui *symbolic politics*, isu femisida dibingkai melalui simbol yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan moral dan politik. Melalui *leverage politics*, jaringan advokasi menggunakan tekanan dari forum internasional, lembaga HAM, dan organisasi transnasional untuk meningkatkan tekanan reputasional terhadap Honduras. Melalui *accountability politics*, jaringan menagih tanggung jawab pemerintah Honduras berdasarkan komitmen HAM internasional dan kewajiban negara dalam melindungi perempuan (Keck and Sikkink 1998, 24).

Pada penelitian ini, dari lima pengaruh jaringan advokasi lebih kuat terlihat pada tahap pembentukan isu, perubahan wacana, dan dorongan prosedural. Sementara itu, tidak ada perubahan yang berpengaruh pada penurunan angka femisida dari kebijakan yang diambil oleh negara. Terakhir, pengaruh perilaku negara belum terjadi secara signifikan karena kekerasan terhadap perempuan dan lemahnya penegakan hukum masih terus menjadi persoalan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana jejaring advokasi transnasional bekerja dalam merespons krisis femisida di Honduras tahun 2018-2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, hubungan antar aktor, dan strategi advokasi yang digunakan dalam suatu jaringan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat bagaimana berbagai aktor membangun, menyampaikan, dan memperluas isu femisida melalui pertukaran informasi, dukungan antar aktor, serta tuntutan terhadap tanggung jawab negara (Creswell and Poth 2018, 45-46).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring advokasi transnasional terkait krisis femisida di Honduras, seperti organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, media, organisasi internasional, serta lembaga yang berkaitan dengan isu hak perempuan.

Objek penelitian ini adalah mekanisme kerja jejaring advokasi transnasional dalam merespons krisis femisida di Honduras tahun 2018-2024. Penelitian berfokus pada hubungan antar aktor, proses penyebaran informasi, serta penggunaan strategi advokasi (Keck and Sikkink 1998).

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen lembaga internasional, publikasi resmi organisasi terkait, serta laporan mengenai kondisi femisida dan kekerasan terhadap perempuan di Honduras.

Data yang dikumpulkan berkaitan dengan perkembangan krisis femisida, aktor yang terlibat dalam jaringan advokasi, mekanisme *boomerang pattern*, serta strategi advokasi dalam TAN. Melalui data tersebut, penelitian menganalisis bagaimana informasi, tuntutan, dan hubungan antar aktor bergerak dalam jejaring advokasi transnasional (Keck and Sikkink 1998, 24).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penulis mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan konsep TAN, femisida, advokasi transnasional, serta kondisi kekerasan berbasis gender di Honduras. Kedua, penulis mengumpulkan dan memilih sumber yang relevan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Ketiga, data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti aktor dalam jaringan, mekanisme *boomerang pattern*, strategi advokasi, serta hubungan antara aktor domestik dan internasional.
Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kerangka TAN untuk melihat bagaimana jejaring advokasi bekerja dalam merespons krisis femisida di Honduras.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun ke dalam empat bab utama guna memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, serta metode penelitian.
- BAB II: Jaringan Advokasi Transnasional dan *Boomerang Pattern* dalam Isu Femisida di Honduras, membahas aktor-aktor yang terlibat dalam

jaringan, posisi CDM sebagai *political entrepreneur,* serta bagaimana pola *boomerang* bekerja ketika advokasi domestik mengalami hambatan.

- BAB III: Taktik dan Pengaruh Jaringan Advokasi, menguraikan empat taktik TAN, yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics,* serta menganalisis tahapan pengaruh jaringan terhadap kebijakan dan respons negara.
- BAB IV: Penutup, berisi kesimpulan hasil analisis serta rekomendasi akademik dan praktis bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

JARINGAN AKTOR *DAN BOOMERANG PATTERN* DALAM ISU FEMISIDA DI HONDURAS

Jaringan advokasi femisida di Honduras melibatkan organisasi perempuan, masyarakat sipil, media, lembaga HAM, organisasi internasional, dan institusi negara. Setiap aktor memiliki peran berbeda dalam menghasilkan informasi, menyebarkan isu, dan menyampaikan tuntutan kepada negara. Dalam jaringan ini, CDM dipahami sebagai salah satu aktor yang berperan sebagai *political entrepreneur* dalam menghubungkan isu femisida dengan ruang advokasi yang lebih luas (Keck and Sikkink 1998, 17).

Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu aktor dalam jaringan advokasi femisida di Honduras dan *boomerang pattern* dalam proses advokasi transnasional.

2.1 Aktor dalam Jaringan Advokasi Femisida di Honduras

Dalam kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN), aktor adalah pihak-pihak yang terhubung karena memiliki nilai dan tujuan yang sama, kemudian saling bertukar informasi, gagasan, dan sumber daya untuk mendorong perhatian publik maupun perubahan kebijakan terhadap suatu isu (Keck and Sikkink 1998, 10-11). Karena itu, jaringan advokasi femisida di Honduras tidak bergerak melalui satu organisasi saja, melainkan melalui hubungan antara berbagai aktor yang memiliki fungsi berbeda. Beberapa aktor berperan dalam menghasilkan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian melakukan dokumentasi dan penyebaran isu, sementara aktor lainnya membawa persoalan tersebut ke ruang politik nasional maupun internasional (Keck and Sikkink 1998, 17).

Salah satu aktor yang memiliki posisi penting dalam jaringan advokasi femisida di Honduras adalah Centro de Derechos de Mujeres (Pusat Hak-Hak Perempuan). CDM memiliki posisi yang berbeda dari aktor lain karena tidak hanya melakukan pemantauan dan penyusunan laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan melalui Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (Pusat Pemantauan HAM Perempuan), tetapi juga secara aktif mengangkat femisida sebagai persoalan hak perempuan dan tanggung jawab negara (Centro de Derechos de Mujeres 2024). Melalui laporan, penyampaian tuntutan, dan penggunaan narasi seperti "Justicia para las mujeres, Basta de Femicidios!" yang berarti "keadilan bagi perempuan, hentikan pembunuhan perempuan'', CDM berupaya mengubah berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi tuntutan kolektif yang lebih luas.

Peran tersebut membedakan CDM dari aktor lain dalam jaringan. Cattrachas lebih berfokus pada dokumentasi dan penyediaan informasi mengenai pola kasus, sedangkan media seperti Contracorriente berperan dalam memperluas visibilitas isu kepada publik. CDM, di sisi lain, menggunakan informasi dan temuan tersebut untuk membingkai femisida sebagai persoalan yang membutuhkan respons negara serta mendorongnya menjadi bagian dari agenda advokasi. Oleh karena itu, CDM dikategorikan sebagai *political entrepreneur* karena memiliki peran yang lebih aktif dalam mengangkat, membingkai, dan mendorong isu femisida dalam proses advokasi, bukan hanya menjalankan satu fungsi tertentu dalam jaringan (Keck and Sikkink 1998).

CDM juga tidak bekerja secara terpisah dari aktor lain. IM-Defensoras menyebut CDM sebagai salah satu organisasi yang terlibat dalam jaringan pembela

HAM perempuan di Honduras (IM-Defensoras 2017). Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa CDM memiliki hubungan dengan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa. Di satu sisi, CDM menerima dan mengolah informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan, sementara di sisi lain, CDM menghubungkan informasi tersebut dengan jaringan organisasi perempuan, media, dan forum advokasi yang lebih luas agar isu femisida tidak berhenti sebagai persoalan domestik (IM-Defensoras 2017).

Melalui peran tersebut, CDM tidak hanya melakukan dokumentasi, tetapi juga melakukan pembingkaian (*framing*) terhadap isu femisida. Kekerasan terhadap perempuan dipahami bukan hanya sebagai kasus kriminal individual, tetapi sebagai persoalan HAM yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan. Proses pembingkaian ini penting karena memungkinkan pengalaman korban yang sebelumnya berada dalam ruang privat untuk masuk ke ruang publik dan politik sehingga dapat menjadi bagian dari agenda advokasi yang lebih luas (IM-Defensoras 2017).

Selain CDM, produksi informasi mengenai femisida di Honduras juga melibatkan aktor lain yang berperan dalam menyediakan data mengenai perkembangan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu aktor tersebut adalah Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) dari Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Melalui *Observatorio de la Violencia* (Pusat Pemantauan Kekerasan), IUDPAS melakukan pemantauan terhadap berbagai bentuk kekerasan di Honduras, termasuk kematian perempuan akibat kekerasan berbasis gender. Berbeda dengan CDM yang menggunakan informasi dalam kerangka advokasi hak perempuan, IUDPAS berperan sebagai lembaga

akademik yang menghasilkan data dan analisis mengenai pola kekerasan melalui pendekatan berbasis penelitian (IUDPAS-UNAH 2025).

Data yang dihasilkan IUDPAS diperoleh melalui proses pemantauan dan pengolahan informasi mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Honduras. Hasil pengolahan tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk laporan statistik yang memuat perkembangan kasus, karakteristik korban, serta pola kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan IUDPAS menunjukkan bahwa jaringan advokasi femisida tidak hanya membutuhkan organisasi yang melakukan kampanye atau pendampingan korban, tetapi juga membutuhkan aktor yang menyediakan data empiris sebagai dasar dalam membangun tuntutan advokasi (IUDPAS-UNAH 2025).

Selain CDM dan IUDPAS, jaringan advokasi femisida di Honduras juga melibatkan berbagai organisasi perempuan dan masyarakat sipil lainnya, seperti Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), Foro de Mujeres por la Vida, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH), dan Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Organisasi-organisasi tersebut bekerja melalui pendampingan korban, pendidikan gender, kampanye publik, pengumpulan pengalaman perempuan, serta advokasi hukum. Informasi yang diperoleh melalui hubungan langsung dengan komunitas dan korban menjadi bagian penting dalam menunjukkan hambatan yang dialami perempuan ketika mencari perlindungan dan memperoleh keadilan dari institusi negara (CEM-H 2022).

Organisasi-organisasi tersebut juga berkoordinasi melalui Plataforma EPU Mujeres, yaitu jaringan organisasi masyarakat sipil yang menyusun laporan mengenai kondisi hak perempuan di Honduras untuk mekanisme *Universal*

Periodic Review (UPR). Laporan tersebut memuat informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan, hambatan akses keadilan, serta rekomendasi kepada pemerintah Honduras. Penyusunan laporan bersama ini menunjukkan bahwa informasi mengenai femisida tidak hanya diproduksi oleh satu organisasi, tetapi melalui kerja kolektif berbagai aktor dalam jaringan advokasi perempuan Honduras (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6).

Selain organisasi yang melakukan pendampingan korban dan advokasi kebijakan, terdapat pula aktor yang secara khusus berperan dalam dokumentasi kasus, yaitu Cattrachas. Cattrachas merupakan organisasi masyarakat sipil feminis yang melakukan pemantauan terhadap kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap kelompok rentan di Honduras. Melalui *Observatorio de Muertes Violentas* (Pusat Pemantauan Akibat Kekerasan), Cattrachas melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media mengenai kasus kematian perempuan dan femisida. Informasi yang diperoleh kemudian didokumentasikan untuk melihat pola kekerasan, karakteristik kasus, serta perkembangan penanganan kasus oleh institusi negara (Cattrachas 2024).

Peran Cattrachas dalam jaringan advokasi berbeda dengan CDM. Jika CDM lebih banyak menggunakan informasi untuk membangun narasi mengenai hak perempuan dan tanggung jawab negara, Cattrachas berperan dalam menyediakan dokumentasi kasus yang memperkuat bukti mengenai keberadaan dan pola femisida di Honduras. Dokumentasi tersebut digunakan oleh organisasi masyarakat sipil lain dalam penyusunan laporan, kampanye publik, maupun penyampaian isu ke forum advokasi yang lebih luas (Cattrachas 2024).

Media juga memegang peran penting dalam jaringan ini karena menjadi saluran yang menghubungkan informasi yang diproduksi oleh organisasi masyarakat sipil dengan perhatian publik. Ketika media memberitakan kasus pembunuhan perempuan, kegagalan investigasi, atau tingginya angka femisida, isu tersebut bergerak dari ruang dokumentasi organisasi menuju ruang diskusi publik. Media membantu memperluas visibilitas kasus sekaligus meningkatkan tekanan sosial terhadap pemerintah karena kasus yang mendapat perhatian luas akan lebih sulit untuk diabaikan (Keck and Sikkink 1998, 29).

Salah satu contoh peran media terlihat melalui Contracorriente yang melakukan pemberitaan investigatif mengenai femisida di Honduras. Dalam laporan berjudul *"Femicidios en Honduras: las mujeres que el Estado no escuchó"* yang berarti "Perempuan yang Suaranya Tidak Didengarkan oleh Negaranya'', Contracorriente membahas kasus femisida dengan menghubungkan data mengenai korban, pengalaman keluarga korban, dan persoalan dalam respons negara. Pemberitaan tersebut menunjukkan bagaimana informasi yang sebelumnya dikumpulkan oleh organisasi masyarakat sipil dapat diperluas melalui media independen dan menjadi perhatian publik yang lebih besar (Herrera 2020).

Pada tingkat internasional, jaringan advokasi femisida Honduras juga diperkuat oleh organisasi internasional dan mekanisme HAM. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah *Universal Periodic Review* (UPR) di bawah Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui mekanisme ini, organisasi masyarakat sipil dapat menyampaikan laporan mengenai kondisi HAM suatu negara sebagai bahan evaluasi internasional. Informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan, femisida, hambatan akses keadilan, dan lemahnya

perlindungan negara menjadi bagian dari isu yang dibawa dalam evaluasi terhadap Honduras (OHCR 2026).

Selain UPR, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) juga menjadi ruang penting bagi jaringan advokasi perempuan Honduras. Melalui laporan alternatif (*shadow report*), organisasi masyarakat sipil menyampaikan informasi mengenai kondisi perempuan, termasuk persoalan kekerasan berbasis gender dan lemahnya mekanisme perlindungan. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh Komite CEDAW dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah Honduras (OHCHR 2026).

Jaringan advokasi ini juga diperkuat oleh organisasi internasional seperti UN Women, Amnesty International, dan UUSC. UN Women terlibat dalam program pencegahan kekerasan berbasis gender serta mendukung penguatan kapasitas aktor lokal dalam menghasilkan informasi dan kebijakan berbasis bukti (UN Women 2024). Amnesty International memperluas perhatian internasional melalui laporan dan kampanye mengenai kekerasan serta diskriminasi yang dialami perempuan di Honduras (Amnesty International 2025). Sementara itu, UUSC mendukung organisasi lokal seperti Foro de Mujeres por la Vida melalui kerja sama dalam penguatan kapasitas, kampanye, dan advokasi terhadap kekerasan berbasis gender (UUSC 2024).

Jika dilihat dari mekanismenya, jaringan advokasi femisida di Honduras bekerja melalui hubungan antar aktor yang memiliki fungsi berbeda. Organisasi perempuan menghubungkan pengalaman korban dengan tuntutan advokasi, CDM mengolah informasi menjadi narasi politik mengenai perlindungan hak perempuan, IUDPAS menyediakan data statistik, Cattrachas memperkuat dokumentasi kasus,

media memperluas penyebaran isu, sementara organisasi internasional dan mekanisme HAM menyediakan ruang tekanan terhadap pemerintah Honduras (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6).

2.2 *Boomerang Pattern* dalam kasus femisida

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *boomerang pattern* terjadi ketika organisasi masyarakat sipil di tingkat domestik menghadapi hambatan dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Dalam kondisi tersebut, organisasi domestik membangun hubungan dengan aktor internasional untuk memperoleh dukungan dan memperluas ruang advokasi. Isu yang berasal dari tingkat nasional kemudian bergerak melalui jaringan internasional dan kembali diarahkan kepada negara melalui tekanan, rekomendasi, atau perhatian dari aktor eksternal (Keck and Sikkink 1998, 20-21).

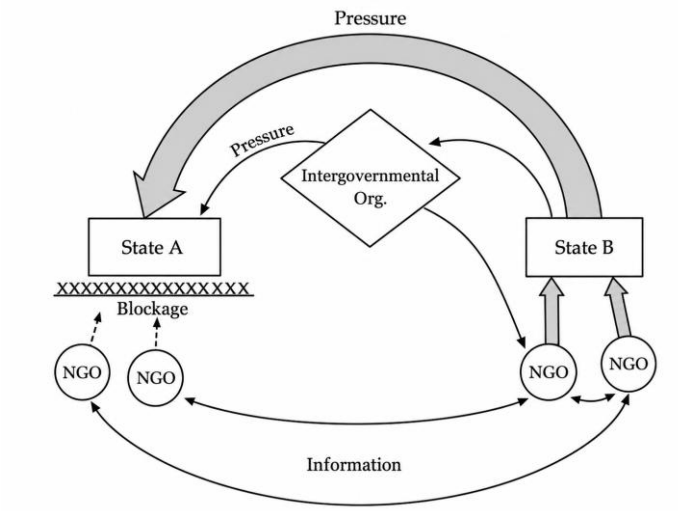
Boomerang Pattern menunjukkan bahwa advokasi transnasional bekerja melalui hubungan antar aktor yang memiliki fungsi berbeda. Organisasi masyarakat sipil berada pada posisi yang dekat dengan persoalan di tingkat lokal sehingga berperan menghasilkan informasi dan membawa pengalaman korban ke ruang publik. Sementara itu, aktor internasional menyediakan ruang politik yang memungkinkan suatu isu memperoleh perhatian lebih luas ketika jalur domestik mengalami keterbatasan (Keck and Sikkink 1998, 18).

Pada advokasi femisida di Honduras, hambatan yang dihadapi organisasi perempuan tidak sepenuhnya berupa penutupan ruang advokasi atau pembungkaman terhadap masyarakat sipil. Organisasi perempuan masih memiliki ruang untuk melakukan protes, menyampaikan tuntutan, dan mengangkat isu femisida di ruang publik. Namun, hambatan utama terlihat pada keterbatasan

optimalisasi jalur domestik dalam menghasilkan respons yang memadai dari negara. Tingginya impunitas, lemahnya proses penyelidikan dan penegakan hukum, serta berbagai hambatan perempuan dalam memperoleh akses terhadap keadilan membuat tuntutan yang disampaikan di tingkat domestik tidak selalu menghasilkan perubahan yang diharapkan. Bahkan, IACHR mencatat masih adanya persoalan dalam akses perempuan terhadap keadilan serta pola impunitas yang terus berlangsung dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Honduras (Inter-American Commission on Human Rights 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi bukan berupa blokade politik secara menyeluruh, melainkan keterbatasan respons dan kapasitas jalur domestik dalam menindaklanjuti tuntutan advokasi. Karena itu, organisasi perempuan tetap dapat bergerak di tingkat nasional, tetapi juga memiliki alasan untuk memperluas advokasi melalui jaringan dan mekanisme internasional ketika upaya domestik belum memberikan respons yang memadai.

Bagan 1. ***Boomerang Pattern***



Sumber : (Keck and Sikkink 1998, 21).

Gambar tersebut menjelaskan bahwa *boomerang pattern* dimulai dari hubungan antara aktor domestik dan negara asal (*State A*). Di Honduras, posisi *State A* merujuk pada pemerintah Honduras sebagai negara tempat krisis femisida berlangsung. Organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil berada pada sisi domestik karena mereka berhadapan langsung dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan serta berusaha mendorong respons negara terhadap masalah tersebut (Keck and Sikkink 1998, 13).

Bagian hambatan (*blockage*) dalam gambar menggambarkan kondisi ketika tuntutan dari aktor domestik belum sepenuhnya memperoleh respons melalui mekanisme nasional. Pada Honduras, organisasi masyarakat sipil menyoroti berbagai persoalan dalam perlindungan perempuan, termasuk tingginya kekerasan berbasis gender, hambatan akses keadilan, serta persoalan impunitas dalam penanganan kasus. Kondisi tersebut mendorong organisasi masyarakat sipil untuk mencari jalur advokasi melalui jaringan internasional (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 16-18).

Pergerakan informasi dalam gambar ditunjukkan melalui hubungan antara organisasi masyarakat sipil domestik dengan aktor internasional. Pada kasus Honduras, informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan bergerak melalui laporan organisasi, publikasi advokasi, dan forum HAM. Informasi yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat sipil Honduras kemudian disebarkan melalui berbagai saluran advokasi. Salah satu jalur tersebut adalah mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR). Melalui *Plataforma EPU Mujeres*, organisasi perempuan Honduras menyusun laporan mengenai kondisi hak perempuan, kekerasan berbasis gender,

serta tantangan perlindungan korban untuk disampaikan dalam proses evaluasi HAM internasional (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6).

Pada sisi kanan gambar, aktor internasional berperan sebagai penghubung yang memperluas tekanan terhadap pemerintah Honduras. Aktor tersebut mencakup mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, sistem HAM regional melalui *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR), serta organisasi internasional yang memberikan perhatian terhadap isu perempuan. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan ruang bagi penyampaian laporan, evaluasi, dan rekomendasi terkait perlindungan hak perempuan (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 16-17).

Panah tekanan (*pressure*) yang kembali menuju *State A* menggambarkan bagaimana isu yang sebelumnya berasal dari tingkat domestik kembali diarahkan kepada pemerintah Honduras melalui dukungan internasional.Tekanan tersebut terlihat melalui rekomendasi dalam mekanisme HAM internasional yang meminta pemerintah memperkuat perlindungan perempuan, meningkatkan pencegahan kekerasan, dan memperbaiki penanganan kasus kekerasan berbasis gender (United Nations Human Rights Council 2020).

Dukungan internasional dalam proses tersebut juga datang dari negara lain yang dapat ditempatkan sebagai State B. Salah satu contohnya adalah Kanada. Dalam UPR 2020, Kanada merekomendasikan Honduras untuk memperkuat pencegahan, penyelidikan, dan penghukuman terhadap kekerasan seksual dan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan kekerasan terhadap kelompok LGBTI (Global Affairs Canada 2020). Posisi Kanada sebagai State B terlihat dari rekomendasi yang diberikan melalui forum internasional dan diarahkan kepada

pemerintah Honduras. Artinya, tuntutan yang sebelumnya disuarakan oleh organisasi perempuan di Honduras mendapat dukungan dari negara lain dan ikut memberikan tekanan kepada pemerintah.

Inggris dan Australia juga memberikan rekomendasi terkait kekerasan berbasis gender dalam UPR 2025. Karena rekomendasi tersebut berada di luar periode penelitian 2018-2024, keduanya tidak digunakan sebagai contoh utama State B, tetapi dapat menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu femisida dan kekerasan berbasis gender di Honduras masih berlanjut setelah periode penelitian (United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office 2025). Australia juga memberikan rekomendasi terkait penguatan respons terhadap kekerasan berbasis gender dan dukungan terhadap layanan bagi korban (Australian Department of Foreign Affairs and Trade 2025). Kanada menjadi contoh State B yang lebih sesuai dengan periode penelitian karena rekomendasinya muncul dalam UPR 2020.

Penerapan *boomerang pattern* ini menunjukkan alur yang dimulai dari organisasi masyarakat sipil sebagai penghasil informasi mengenai femisida, kemudian informasi tersebut bergerak menuju jaringan internasional melalui laporan dan forum HAM. Setelah memperoleh perhatian internasional, tuntutan tersebut kembali diarahkan kepada pemerintah Honduras sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan respons. Penerapan *boomerang pattern* dalam femisida Honduras memperlihatkan alur ketika informasi dan tuntutan yang dibangun oleh organisasi masyarakat sipil di tingkat domestik dibawa ke forum HAM internasional. Dalam proses tersebut, keterhubungan antar aktor tidak selalu berbentuk satu organisasi formal, tetapi dapat berlangsung melalui penyusunan

laporan bersama, penggunaan informasi yang dihimpun oleh berbagai organisasi, serta pemanfaatan mekanisme internasional untuk menyampaikan tuntutan kepada negara. Plataforma EPU Mujeres menjadi salah satu contoh ruang bersama yang menghimpun temuan organisasi masyarakat sipil mengenai kondisi perempuan Honduras sebelum persoalan tersebut dibawa ke mekanisme UPR (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6). Setelah memperoleh perhatian dalam ruang internasional, rekomendasi dan tekanan yang muncul kembali diarahkan kepada pemerintah Honduras sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan respons.

BAB III

TAKTIK ADVOKASI DAN PENGARUH JARINGAN ADVOKASI FEMISIDA DI HONDURAS

Bab ini membahas taktik advokasi yang digunakan dalam jaringan advokasi femisida di Honduras. Setelah Bab II menjelaskan aktor-aktor dalam jaringan serta mekanisme *boomerang pattern*, Bab III menelaah cara kerja advokasi melalui empat taktik TAN, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* (Keck and Sikkink 1998, 24). Keempat taktik ini digunakan untuk melihat bagaimana organisasi perempuan dan aktor-aktor lain dalam jaringan mengolah informasi, membangun pemaknaan isu, memanfaatkan dukungan eksternal, dan mendorong pertanggungjawaban negara.

3.1 Taktik Advokasi dalam Jaringan TAN Isu Femisida di Honduras 2018 - 2024

3.1.1 Information Politics (Politik Informasi)

Dalam jaringan advokasi transnasional (*Transnational Advocacy Network*), informasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan aktor untuk membawa suatu isu ke ruang publik dan politik. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi ke tempat yang dapat memberikan dampak lebih besar merupakan bagian penting dari kerja jaringan advokasi (Keck and Sikkink 1998, 26).

Dalam perspektif ini, informasi tidak hanya dipahami sebagai data mengenai suatu peristiwa, tetapi sebagai hasil dari proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran yang dilakukan oleh aktor dalam jaringan. Informasi

digunakan untuk menjelaskan suatu persoalan, membangun pemahaman mengenai kondisi yang terjadi, serta menjadi dasar bagi penyusunan tuntutan kepada pihak yang dianggap memiliki kewenangan (Keck and Sikkink 1998, 26).

Salah satu aktor yang berperan dalam produksi data adalah Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) dari Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Melalui *Observatorio de la Violencia* (Pusat Pemantauan Kekerasan), IUDPAS melakukan pemantauan terhadap berbagai bentuk kekerasan di Honduras, termasuk kematian perempuan akibat kekerasan berbasis gender. Informasi tersebut diperoleh melalui pemantauan pemberitaan media serta data dari institusi terkait yang menangani kasus kekerasan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan karakteristik korban, lokasi kejadian, bentuk kekerasan, dan perkembangan kasus sebelum dipublikasikan dalam laporan statistik (IUDPAS-UNAH 2023).

Data dari IUDPAS memberikan gambaran mengenai perkembangan femisida melalui jumlah kasus dan pola kejadian. Namun, angka tersebut belum menjelaskan bagaimana korban mengalami kekerasan maupun persoalan yang muncul dalam proses penanganan kasus. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil menggunakan data statistik tersebut bersama dokumentasi lain untuk menjelaskan persoalan femisida secara lebih luas, termasuk kaitannya dengan akses keadilan dan respons negara (IUDPAS-UNAH 2023).

Melalui lembaga akademik, informasi mengenai femisida juga diproduksi melalui kegiatan dokumentasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil. Salah satu aktor yang berperan dalam proses ini adalah Cattrachas melalui *Observatorio de Muertes Violentas*. Organisasi ini memantau pemberitaan media terkait kematian

perempuan dan kekerasan berbasis gender, lalu mencatat informasi berdasarkan identitas korban, lokasi kejadian, bentuk kekerasan, serta perkembangan kasus apabila tersedia (Cattrachas 2024).

Dokumentasi yang dilakukan Cattrachas berfungsi untuk menunjukkan pola kekerasan yang terjadi secara berulang. Melalui pencatatan kasus, organisasi ini menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam laporan advokasi, kampanye publik, dan pembahasan mengenai perlindungan perempuan. Peran Cattrachas berbeda dengan lembaga seperti IUDPAS yang lebih berfokus pada data statistik, karena Cattrachas menekankan dokumentasi kasus per kasus yang memperlihatkan pengalaman korban dan karakteristik kekerasan yang terjadi.

Informasi mengenai femisida juga diperkuat oleh organisasi perempuan dan masyarakat sipil seperti Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), Foro de Mujeres por la Vida, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH), dan Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Organisasi-organisasi ini memperoleh informasi melalui pendampingan korban, kedekatan dengan komunitas, dan kegiatan advokasi di tingkat lokal. Dari pengalaman korban yang mereka temui, muncul informasi yang membantu menjelaskan hambatan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh perlindungan dan keadilan.

Kerja sama antar organisasi tersebut terlihat melalui Plataforma EPU Mujeres, yaitu jaringan organisasi masyarakat sipil yang menyusun laporan tentang kondisi hak perempuan di Honduras untuk mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR). Proses tersebut juga memperlihatkan bahwa keterhubungan antar aktor tidak hanya terjadi karena mereka memiliki perhatian terhadap isu yang sama, tetapi melalui ruang bersama untuk menghimpun dan merumuskan persoalan yang akan

dibawa dalam advokasi. Plataforma EPU Mujeres menjadi salah satu ruang yang menghubungkan temuan dan pengalaman dari berbagai organisasi perempuan ke dalam satu laporan mengenai kondisi hak perempuan di Honduras. Melalui proses tersebut, persoalan yang sebelumnya dikumpulkan dari berbagai wilayah dan organisasi tidak disampaikan secara terpisah, tetapi dihimpun menjadi agenda dan rekomendasi bersama sebelum dibawa ke mekanisme UPR (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6).

Dalam jaringan tersebut, CDM memiliki peran sebagai salah satu aktor yang mengolah informasi menjadi bahan advokasi. Melalui *Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres* (Pusat Pemantauan HAM Perempuan), CDM melakukan pemantauan dan publikasi mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. CDM menjelaskan bahwa observatorium tersebut bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan yang dialami perempuan Honduras.

Melalui publikasi yang dimuat di website CDM seperti *Violencias contra las mujeres en Honduras* (Kekerasan Terhadap Perempuan di Honduras), CDM menyusun informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan menghubungkannya pada persoalan yang lebih luas, seperti impunitas, keterbatasan akses keadilan, dan tanggung jawab negara. Dalam proses ini, posisi CDM terlihat bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi sebagai salah satu aktor yang mengubah informasi yang berasal dari berbagai temuan menjadi narasi advokasi mengenai hak perempuan (Centro de Derechos de Mujeres 2024).

Setelah diproduksi oleh aktor domestik, informasi mengenai femisida kemudian bergerak melalui ruang publik Honduras. Media memiliki peran penting

dalam proses ini karena menjadi saluran yang memperluas penyebaran informasi dari laporan organisasi masyarakat sipil kepada masyarakat umum. Salah satu contohnya adalah Contracorriente melalui laporan investigasi *"Femicidios en Honduras: las mujeres que el Estado no escuchó"* yang berarti "Perempuan yang Suaranya Tidak Didengarkan oleh Negara''. Laporan tersebut menghubungkan data mengenai femisida dengan pengalaman keluarga korban serta persoalan dalam respons negara terhadap kasus kekerasan perempuan (Herrera 2020).

Penyebaran melalui media membuat informasi mengenai femisida tidak hanya berada dalam ruang organisasi, tetapi menjadi bagian dari pembahasan publik. Data statistik, dokumentasi kasus, dan pengalaman korban kemudian saling melengkapi dalam membangun pemahaman mengenai persoalan femisida di Honduras.

Informasi yang telah dikumpulkan oleh aktor domestik kemudian dibawa ke tingkat internasional melalui mekanisme HAM. Salah satu jalurnya adalah UPR di bawah Dewan HAM PBB. Dalam mekanisme tersebut, laporan organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu sumber informasi dalam proses evaluasi kondisi HAM suatu negara (UPR 2025).

Selain UPR, isu kekerasan terhadap perempuan Honduras juga dibahas melalui mekanisme CEDAW. Melalui laporan alternatif (*shadow report*), organisasi masyarakat sipil menyampaikan informasi mengenai diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan kelemahan perlindungan negara terhadap perempuan. Informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari proses evaluasi internasional terhadap Honduras (OHCHR 2022).

Pergerakan informasi dari tingkat lokal menuju internasional juga terlihat melalui laporan organisasi seperti Amnesty International. Dalam laporan mengenai kondisi HAM Honduras, Amnesty membahas kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan serta kelompok LGBTIQ. Amnesty menyatakan bahwa *"Women and LGBTI people were subjected to violence and discrimination"* (Amnesty International 2025). Laporan tersebut memperlihatkan bagaimana informasi mengenai kondisi perempuan yang awalnya dikumpulkan oleh aktor domestik dapat masuk ke jaringan advokasi internasional.

Melalui proses tersebut, *information politics* dalam jaringan advokasi femisida Honduras berlangsung melalui hubungan antar aktor yang saling melengkapi. IUDPAS menyediakan data statistik, Cattrachas memperkuat dokumentasi kasus, organisasi perempuan membawa pengalaman korban, media memperluas penyebaran isu, dan organisasi internasional menyediakan ruang advokasi di tingkat global.

3.1.2 Symbolic Politics (Politik Simbolik)

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *symbolic politics* merupakan kemampuan jaringan advokasi dalam menggunakan simbol, cerita, atau tindakan tertentu agar suatu isu dapat dipahami oleh pihak lain yang berada jauh dari lokasi persoalan (Keck and Sikkink 1998, 24).

Dalam jaringan advokasi transnasional mengenai femisida di Honduras, simbol digunakan untuk membangun pemahaman mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. Dua simbol yang terlihat dalam advokasi femisida Honduras adalah penggunaan istilah "*femicidio"* dan seruan "*Justicia para las mujeres Basta de Femicidios!"* yang berarti "keadilan bagi perempuan, hentikan pembunuhan

perempuan''. Kedua simbol tersebut digunakan oleh aktor dalam jaringan advokasi, seperti organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga HAM, untuk membingkai femisida sebagai persoalan kekerasan berbasis gender dan tanggung jawab negara (Centro de Derechos de Mujeres 2023).

Konsep tersebut menjelaskan bahwa simbol membantu jaringan advokasi menerjemahkan pengalaman lokal menjadi isu yang memiliki makna lebih luas. Melalui simbol tertentu, suatu persoalan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa individual, tetapi dikaitkan dengan nilai dan norma yang lebih besar seperti HAM, perlindungan perempuan, dan tanggung jawab negara (Keck and Sikkink 1998, 22).

Simbol pertama dalam advokasi femisida Honduras terlihat melalui penggunaan istilah *"femicidio"*. Istilah tersebut digunakan untuk membedakan pembunuhan terhadap perempuan dari tindak kriminal biasa karena menekankan adanya hubungan antara kematian perempuan dan kekerasan berbasis gender. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pembunuhan perempuan dipandang sebagai bagian dari pola kekerasan yang berkaitan dengan diskriminasi, impunitas, dan lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan. *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Honduras masih berkaitan dengan persoalan impunitas dan hambatan akses keadilan bagi korban (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 93).

Penggunaan istilah *femicidio* juga ditemukan dalam publikasi organisasi perempuan Honduras yang melakukan pemantauan terhadap kekerasan berbasis gender. Melalui *Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres* (Pusat Pemantauan HAM Perempuan), Centro de Derechos de Mujeres (Pusat Hak-Hak

Perempuan) menyusun laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pemantauan kasus dan informasi dari berbagai sumber, termasuk pemberitaan media. Publikasi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai kondisi perempuan Honduras dalam jaringan advokasi (Centro de Derechos de Mujeres 2023).

Simbol kedua terlihat CDM menggunakan seruan "*Justicia para las mujeres Basta de Femicidios!"* yang berarti "Keadilan bagi perempuan, hentikan femisida!'' sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perhatian terhadap tingginya kasus kekerasan berbasis gender. Seruan tersebut muncul dalam pernyataan publik organisasi perempuan Honduras yang menyoroti persoalan femisida dan tuntutan penghentian kekerasan terhadap perempuan. Pernyataan tersebut digunakan untuk menyampaikan bahwa penanganan femisida tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga membutuhkan tindakan pencegahan dari negara (Centro de Derechos de Mujeres 2024).

Seruan tersebut memiliki fungsi simbolik karena mengubah berbagai kasus pembunuhan perempuan menjadi tuntutan kolektif mengenai perlindungan perempuan. Dalam kerangka *symbolic politics*, penggunaan kalimat yang mudah dikenali membantu jaringan advokasi menyampaikan pesan mengenai suatu persoalan kepada audiens yang lebih luas (Keck and Sikkink 1998, 22).

Pembentukan simbol dalam advokasi femisida Honduras tidak dilakukan oleh satu organisasi saja. Organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, media, dan lembaga HAM internasional memiliki peran berbeda dalam membangun serta menyebarkan narasi mengenai femisida. Organisasi perempuan menghasilkan laporan dan tuntutan, media membantu memperluas penyebaran isu,

sedangkan lembaga HAM internasional menyediakan ruang pembahasan melalui standar perlindungan hak perempuan. Dalam laporan *Plataforma EPU Mujeres*, berbagai organisasi perempuan Honduras menyampaikan persoalan kekerasan berbasis gender melalui mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) sebagai bagian dari advokasi di tingkat internasional (Plataforma EPU Mujeres 2025, 8).

3.1.3 Leverage Politics (Politik Pengungkit)

Dalam advokasi femisida di Honduras, organisasi perempuan dan masyarakat sipil menghadapi keterbatasan karena mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah kebijakan negara. Keputusan mengenai hukum, perlindungan korban, dan penanganan kasus berada pada institusi negara. Karena itu, organisasi dalam jaringan advokasi membangun hubungan dengan aktor lain yang memiliki legitimasi politik, akses internasional, maupun sumber daya yang lebih besar untuk memperkuat tuntutan mereka. Keck dan Sikkink menjelaskan strategi ini sebagai *leverage politics*, yaitu penggunaan dukungan eksternal untuk meningkatkan tekanan terhadap aktor yang menjadi sasaran advokasi. Strategi tersebut dapat berbentuk *moral leverage* melalui penggunaan norma dan komitmen internasional, serta *material leverage* mengaitkan isu dengan uang atau barang (Keck and Sikkink 1998, 31).

Pada periode 2018-2024, bentuk *leverage politics* yang paling menonjol adalah *moral leverage*. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan kriminal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memenuhi standar HAM. Organisasi perempuan dan masyarakat sipil memakai komitmen internasional Honduras, terutama CEDAW dan *Belém do Pará Convention* atau *Inter-American Convention on the Prevention,*

Punishment, and Eradication of Violence against Women merupakan instrumen regional yang diadopsi pada tahun 1994 untuk mencegah, menghukum, dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Konvensi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menangani kekerasan terhadap perempuan (Organization of American States 1994). Kedua instrumen tersebut mewajibkan negara melakukan pencegahan kekerasan berbasis gender, melindungi korban, dan menyediakan mekanisme penanganan yang memadai.

Dalam advokasi transnasional, *Belém do Pará Convention* memberikan dasar normatif yang memungkinkan organisasi perempuan menghubungkan persoalan femisida di Honduras dengan standar perlindungan perempuan di tingkat regional. Konvensi ini menjadi rujukan untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban Honduras sebagai negara pihak. Dengan menggunakan standar tersebut, organisasi perempuan dapat memperkuat tuntutan mereka dan membawa perhatian terhadap persoalan femisida ke ruang advokasi yang lebih luas. Relevansi *Belém do Pará Convention* dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai dasar normatif yang memperkuat tuntutan terhadap negara dalam proses advokasi transnasional.

Penggunaan komitmen internasional tersebut terlihat melalui keterlibatan organisasi perempuan Honduras dalam mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR). Melalui Plataforma EPU Mujeres, organisasi seperti Centro de Estudios de

la Mujer-Honduras (CEM-H), Foro de Mujeres por la Vida, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH), Ecuménicas por el Derecho a Decidir, dan organisasi masyarakat sipil lainnya menyusun laporan mengenai kondisi hak perempuan di Honduras. Laporan tersebut memuat informasi mengenai kekerasan berbasis gender, kasus femisida, hambatan akses keadilan, serta kelemahan perlindungan negara terhadap perempuan (Plataforma EPU Mujeres 2025, 8).

Laporan tersebut kemudian dipakai sebagai masukan dalam evaluasi HAM Honduras melalui mekanisme UPR. Melalui forum ini, organisasi masyarakat sipil menyampaikan tuntutan agar pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai komitmen HAM internasional yang telah disepakati. Tuntutan itu bukan berupa sanksi langsung, melainkan dorongan agar pemerintah memperbaiki kebijakan, memperkuat perlindungan bagi korban, dan meningkatkan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Dengan membawa isu femisida ke forum internasional, organisasi masyarakat sipil berusaha menunjukkan adanya jarak antara kewajiban hukum Honduras dan kondisi perempuan yang masih mengalami kekerasan (United Nations Human Rights Council 2020).

Selain melalui UPR, *moral leverage* juga digunakan melalui mekanisme CEDAW. Dalam proses evaluasi CEDAW, organisasi masyarakat sipil menyampaikan laporan alternatif (*shadow report*) yang berisi temuan mengenai kondisi perempuan di Honduras. Informasi tersebut mencakup persoalan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, serta hambatan yang dialami perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum. Laporan tersebut menjadi bahan

pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan kewajiban Honduras berdasarkan CEDAW (OHCHR 2022).

Pada tingkat nasional, CDM menjadi salah satu organisasi yang menggunakan kerangka HAM internasional untuk membangun tuntutan advokasi. Melalui laporan dan publikasinya, CDM menghubungkan kasus femisida dengan persoalan impunitas, lemahnya proses penanganan kasus, dan keterbatasan akses keadilan bagi korban. Namun, CDM tidak berdiri sebagai satu-satunya aktor dalam proses tersebut. Informasi dan tuntutan yang dibangun CDM berjalan bersama organisasi perempuan lain, media, serta mekanisme HAM internasional yang membentuk jaringan advokasi yang lebih luas (Centro de Derechos de Mujeres 2024).

Sementara itu, belum menemukan data yang menunjukkan adanya penggunaan *material leverage* karena dalam advokasi femisida di Honduras lebih banyak terlihat lewat *moral leverage.* Organisasi perempuan dan masyarakat sipil memakai CEDAW, Convention of Belém do Pará, UPR, dan mekanisme HAM internasional untuk menegaskan kewajiban pemerintah dalam melindungi perempuan.

3.1.4 Accountability Politics (Politik Akuntabilitas)

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *accountability politics* merupakan strategi jaringan advokasi untuk menuntut aktor sasaran agar bertindak sesuai dengan prinsip atau kebijakan yang sebelumnya telah mereka nyatakan. Melalui cara ini, kekerasan terhadap perempuan di Honduras dihubungkan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan (Keck and Sikkink 1998, 31).

Accountability politics terlihat dari upaya berbagai aktor untuk meminta pemerintah Honduras bertanggung jawab atas kewajibannya dalam melindungi hak perempuan. Upaya ini dilakukan lewat laporan, penilaian terhadap kebijakan negara, dan penggunaan mekanisme HAM internasional seperti *Universal Periodic Review* (UPR). Konsep tersebut menunjukkan bahwa tuntutan akuntabilitas muncul ketika terdapat perbedaan antara komitmen yang telah diterima oleh suatu negara dengan kondisi yang terjadi dalam praktik. Dalam jaringan advokasi transnasional, aktor masyarakat sipil menggunakan informasi, laporan, dan forum internasional untuk mempertanyakan tindakan negara berdasarkan kewajiban yang telah dimiliki sebelumnya (Keck and Sikkink 1998, 24).

Sasaran tuntutan akuntabilitas adalah pemerintah Honduras karena memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, menjalankan hukum, dan menyediakan perlindungan bagi perempuan. Tuntutan ini disampaikan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi perempuan dan lembaga HAM, dengan menyoroti impunitas, sulitnya akses keadilan, dan perlunya penguatan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 11).

Salah satu cara penagihan akuntabilitas dilakukan melalui penyusunan laporan masyarakat sipil. Organisasi perempuan Honduras mengumpulkan informasi mengenai kondisi perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender dan respons negara terhadap persoalan tersebut, kemudian menyusunnya dalam laporan advokasi. Salah satu contohnya adalah laporan *Plataforma EPU Mujeres* untuk mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR). Laporan tersebut disusun melalui keterlibatan berbagai organisasi perempuan Honduras dan berisi evaluasi terhadap

pemenuhan hak perempuan, persoalan yang masih terjadi, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Honduras (Plataforma EPU Mujeres 2025).

Melalui mekanisme UPR, penagihan akuntabilitas dilakukan dengan membawa laporan masyarakat sipil ke forum evaluasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam mekanisme tersebut, laporan dari organisasi masyarakat sipil digunakan sebagai bahan untuk menilai kondisi HAM suatu negara dan menjadi dasar bagi negara lain maupun lembaga HAM untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang sedang dievaluasi. Honduras menjadi salah satu negara yang mengikuti siklus evaluasi UPR, termasuk melalui laporan dari kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari proses tersebut.

Selain melalui UPR, tuntutan akuntabilitas juga dilakukan melalui laporan lembaga HAM regional. *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan di Honduras masih berkaitan dengan persoalan impunitas dan hambatan dalam memperoleh keadilan. Temuan tersebut digunakan untuk mempertanyakan bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam mencegah kekerasan, melakukan penyelidikan, dan memberikan perlindungan kepada korban (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 11).

Penagihan akuntabilitas juga terlihat dalam bentuk tuntutan yang lebih spesifik terhadap pemerintah Honduras. Dalam pernyataan bersama organisasi perempuan Honduras, termasuk CDM, organisasi masyarakat sipil meminta adanya transparansi mengenai tingkat impunitas kasus femisida, penguatan mekanisme pencarian perempuan yang hilang, penyediaan dukungan bagi korban, serta kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pernyataan tersebut

dipublikasikan melalui kanal resmi CDM dan ditandatangani oleh berbagai organisasi perempuan Honduras, menunjukkan bahwa tuntutan tersebut berasal dari jaringan organisasi, bukan hanya satu aktor (Centro de Derechos de Mujeres 2026).

Cara penagihan ini menunjukkan bahwa *accountability politics* di Honduras berjalan lewat tekanan berbasis norma dan penilaian publik. Jaringan advokasi tidak bisa memberi hukuman langsung kepada pemerintah, tetapi memakai laporan, forum internasional, dan rekomendasi untuk mempertanyakan apakah komitmen negara sudah sejalan dengan perlindungan bagi perempuan (Keck and Sikkink 1998, 24).

3.2 Tahapan Pengaruh Jaringan Advokasi Transnasional

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa pengaruh jaringan advokasi transnasional tidak dapat dinilai hanya dari perubahan kebijakan formal. Melainkan perlu dibaca secara bertingkat melalui lima tahapan pengaruh, yaitu *issue creation and agenda-setting*, *influence on discursive positions*, *influence on institutional procedures*, *influence on policy change*, dan *influence on state behavior* (Keck and Sikkink 1998, 32).

Tahap pertama adalah *issue creation and agenda-setting*, yaitu saat femisida di Honduras mulai dilihat bukan hanya kasus kriminal biasa, tetapi sebagai masalah publik yang harus ditanggapi negara. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa jaringan advokasi bekerja dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi untuk membuat isu baru dan membawa perhatian internasional ke persoalan yang sebelumnya kurang terlihat (Keck and Sikkink 1998, 33). Di Honduras, CDM lewat *Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres* (Pusat Pemantauan HAM Perempuan) mendata kekerasan terhadap perempuan, lalu Plataforma EPU Mujeres

- Honduras menggabungkan temuan itu ke laporan UPR yang dibuat oleh 37 organisasi perempuan dari lima wilayah, termasuk CDM, CEM-H, Foro de Mujeres por la Vida, RNDDH, dan Ecuménicas por el Derecho a Decidir (Plataforma EPU Mujeres 2025, 6).

Tahap *agenda-setting* penting karena femisida jadi terlihat sebagai tanda bahwa negara belum berhasil melindungi hak perempuan. Namun, tahap ini hanya menunjukkan bahwa isu memperoleh ruang pembahasan dan belum menunjukkan perubahan langsung terhadap kebijakan pemerintah.

Tahap kedua adalah pengaruh terhadap posisi diskursif pemerintah. Cara isu dibahas supaya tekanannya ke negara semakin kuat. Keck dan Sikkink menulis bahwa jaringan advokasi membingkai isu agar lebih menarik perhatian dan lebih mudah masuk ke forum resmi (Keck and Sikkink 1998, 16). Di Honduras, femisida dibahas sebagai kekerasan berbasis gender yang terkait dengan impunitas, diskriminasi, dan kegagalan negara melindungi perempuan (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 11). Laporan Contracorriente menunjukkan bahwa setelah femisida dikriminalisasi pada 2013, hanya sedikit kasus yang berakhir dengan vonis, dan sistem peradilan masih lemah menangani kekerasan berbasis gender. Permasalahanya bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada negara yang belum menjalankan perlindungan dengan baik (Herrera 2020).

Tahap ini berbeda dari perubahan sikap atau tindakan negara. Penggunaan bahasa HAM dalam forum tidak berarti seluruh tuntutan jaringan advokasi telah diterima Honduras, melainkan menunjukkan keberhasilan jaringan dalam membawa femisida sebagai isu tanggung jawab negara dan standar HAM internasional.

Tahap ketiga adalah pengaruh terhadap prosedur institusional, yaitu ketika tekanan dari jaringan advokasi mulai masuk ke prosedur resmi negara. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa jaringan advokasi bisa mendorong penerapan norma dengan menekan negara agar membuat kebijakan dan memantau kepatuhannya (Keck and Sikkink 1998, 200). Di Honduras, ini terlihat dari pembentukan Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios ATIC (Unit Investigasi Kematian Perempuan Akibat Kekerasan dan Pembunuhan Perempuan) dan Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas y Femicidios (Komisi Antarlembaga Pemantauan Kematian Perempuan Akibat Kekerasan dan Pembunuhan Perempuan) yang berjalan sejak 2018 dengan melibatkan institusi negara dan organisasi perempuan (Herrera 2020). Tetapi laporan UPR 2025 masih menyoroti lemahnya investigasi, koordinasi antar instansi, dan perlindungan korban, yang menjadikan prosedur yang ada belum benar-benar mengubah cara kerja negara (Plataforma EPU Mujeres 2025, 8).

Dengan demikian, pengaruh jaringan advokasi terlihat dari masuknya isu femisida ke pemantauan masyarakat sipil, evaluasi internasional UPR, dan lembaga negara terkait perempuan. Namun, bukti yang ada lebih menunjukkan perubahan pada ruang pembahasan isu, bukan perubahan menyeluruh terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan oleh negara.

Tahap keempat adalah pengaruh terhadap perubahan kebijakan negara. Keck dan dan Sikkink menjelaskan bahwa perubahan kebijakan merupakan tahap ketika tuntutan jaringan advokasi diterjemahkan menjadi aturan hukum negara (Keck and Sikkink 1998, 33). Di Honduras justru terlihat kontradiksi antara aturan dan praktik negara. Honduras memang sudah mengkriminalisasi femisida lewat

Legislative Decree No. 23 dengan hukuman 30 sampai 40 tahun penjara (Congreso Nacional de Honduras 2013). Tetapi reformasi *Criminal Code* tahun 2018 direvisi menjadi hukuman 20 sampai 30 tahun, sehingga tindakan negara justru tidak memperkuat perlindungan perempuan (Herrera 2020). Ini menunjukkan bahwa *policy change* yang terjadi bersifat tertulis, tetapi arahnya tidak konsisten dengan upaya menekan femisida (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 17).

Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa jaringan advokasi memiliki ruang untuk mempengaruhi agenda dan evaluasi kebijakan, tetapi perubahan regulasi dalam kasus femisida tidak ditemukan pada periode penelitian.

Tahap kelima adalah pengaruh terhadap perilaku negara. Menurut Keck dan Sikkink, ini tujuan paling jauh dari advokasi karena yang berubah bukan hanya aturan, tetapi juga praktik negara dalam menjalankan kewajibannya (Keck and Sikkink 1998, 201). Di Honduras, perubahan ini belum signifikan. Meski sudah ada UU, unit investigasi khusus, komisi lintas lembaga, dan berbagai mekanisme resmi, femisida tetap tinggi, vonis sedikit, dan impunitas masih dominan (Herrera 2020). Masalah utama bukan kurangnya hukum, melainkan negara belum sungguh-sungguh mengubah cara kerja seperti penyelidikan lambat, perlindungan korban tidak konsisten, dan aparat yang lemah (Inter-American Commission on Human Rights 2024, 11). Jaringan advokasi berkali-kali menekan negara untuk merespons, tetapi belum berhasil mengubah perilakunya secara mendasar (Plataforma EPU Mujeres 2025, 8). Ini sejalan dengan tahap sebelumnya yang juga tidak menemukan pembaruan kebijakan, sehingga sulit mendorong perubahan perilaku negara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah membahas analisis *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam kasus femisida di Honduras pada tahun 2018-2024. Penelitian ini menganalisis bagaimana isu femisida dibangun, bagaimana hubungan antar aktor terbentuk, serta bagaimana strategi advokasi digunakan untuk mendorong perhatian dan pertanggungjawaban terhadap negara.

Bab I menunjukkan bahwa femisida di Honduras merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan terhadap perempuan, tetapi juga berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, impunitas, dan keterbatasan respons negara dalam memberikan perlindungan bagi korban. Kondisi tersebut menyebabkan isu femisida berkembang menjadi persoalan HAM yang melibatkan berbagai aktor dalam jaringan advokasi.

Bab II menunjukkan bahwa jejaring advokasi femisida Honduras terbentuk melalui hubungan antara organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, media, organisasi internasional, dan mekanisme HAM internasional. Melalui pola *boomerang*, keterbatasan respons domestik mendorong aktor lokal untuk memanfaatkan dukungan eksternal agar isu femisida memperoleh perhatian internasional. Dalam jaringan tersebut, CDM berperan sebagai salah satu aktor yang menghubungkan informasi lokal dengan ruang advokasi yang lebih luas, tetapi bukan sebagai satu-satunya penggerak.

Bab III menunjukkan bahwa jaringan advokasi femisida Honduras menjalankan strategi TAN melalui *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Informasi mengenai femisida diproduksi melalui data statistik, dokumentasi kasus, laporan organisasi, dan media, kemudian digunakan untuk membangun narasi bahwa femisida merupakan persoalan HAM. Melalui *leverage politics*, jaringan menggunakan norma internasional seperti CEDAW dan *Convention of Belém do Pará* sebagai dasar tuntutan terhadap negara, sementara dukungan aktor internasional seperti UUSC dan UN Women memperkuat kapasitas organisasi lokal dalam menjalankan advokasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jaringan advokasi lebih terlihat pada tingkat pembentukan isu, perubahan pemahaman, dan peningkatan tekanan normatif terhadap negara. Jaringan berhasil membawa femisida dari persoalan domestik menjadi isu yang dibahas dalam ruang publik dan forum HAM internasional. Namun, perubahan perilaku negara belum signifikan karena kasus femisida, impunitas, dan hambatan akses keadilan masih terus terjadi.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa jejaring advokasi berperan dalam krisis femisida di Honduras melalui produksi dan penyebaran informasi, pembentukan *framing* bahwa femisida merupakan persoalan kekerasan berbasis gender dan HAM, serta penggunaan dukungan aktor dan mekanisme internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap negara. Peran tersebut terlihat dari kemampuan jaringan membawa isu femisida dari ruang domestik ke ruang publik dan forum HAM internasional, serta mendorong masuknya isu tersebut ke dalam agenda dan respons negara. Namun, pengaruh jaringan lebih kuat dalam membangun tekanan normatif dan

mempertahankan isu femisida dalam agenda publik dibandingkan menghasilkan perubahan langsung terhadap perilaku negara.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini membatasi periode kajian 2018-2024, sehingga perkembangan setelah periode tersebut belum tercakup. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait penguatan respons terhadap krisis femisida di Honduras. Salah satu perkembangan yang dapat menjadi arah penelitian selanjutnya adalah reformasi *Criminal Code* Honduras pada 8 Juni 2026 yang memperberat hukuman femisida hingga maksimal 60 tahun penjara dan disertai pembentukan unit peradilan khusus femisida. Perkembangan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama untuk melihat bagaimana reformasi tersebut diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap penanganan femisida dan impunitas di Honduras. Selanjutnya, CDM bersama 17 organisasi perempuan Honduras menerbitkan pronounciamiento pada 10 Juni 2026 yang menilai pemberatan hukuman tanpa penguatan investiasi kriminal sama saja tidak menjawab akar impunitas skruktural. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji bagaimana jaringan advokasi ini terus mempertahankan tekanan *leverage* pasca 2024, termasuk sejauh mana tuntutan-tuntutan lama dalam RUU tersebut akhirnya diakomodasikan atau justru kembali diabaikan oleh negara.

Daftar Pustaka

Artikel Daring

Amnesty International. 2025. “Human Rights in Honduras.” https://www.amnesty.org/en/location/americas/central-america/honduras/report-honduras/.

Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 2025. “50th Session of the Universal Periodic Review.” https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/human-rights/universal-periodic-review/50th-session-universal-periodic-review?

Cattrachas. 2024. “SISTEMAS DE CATTRACHAS.” https://www.cattrachas.org/sistemas?utm.

Centro de Derechos de Mujeres. 2025. “Informe sobre la situaciónde Derechos Humanos delas Mujeres en Honduras (ES/EN) – 4to Ciclo del Examen Periódico Universal.” https://derechosdelamujer.org/informe-sobre-la-situacionde-derechos-humanos-delas-mujeres-en-honduras-es-en-4to-ciclo-del-examen-periodico-universal/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2018. “Violencias contra las mujeres en Honduras - 2018.” https://derechosdelamujer.org/project/2018/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2019. “Violencias contra las mujeres en Honduras – 2019.” https://derechosdelamujer.org/project/2019/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2020. “Violencias contra las mujeres en Honduras – 2020.” https://derechosdelamujer.org/project/2020/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2021. “Violencias contra las mujeres en Honduras – 2021.” https://derechosdelamujer.org/project/2021/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2022. “Violencias contra las mujeres en Honduras – 2022.” https://derechosdelamujer.org/project/2022/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2023. “Violencias contra las mujeres en Honduras – 2023.” https://derechosdelamujer.org/project/2023/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2024. “Violencias Contra las Mujeres en Honduras – 2024.” https://derechosdelamujer.org/project/2024/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2024. “ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN HONDURAS.” https://derechosdelamujer.org/mujeres-en-cifras-3/estadisticas/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2023. “Boletín Anual: Violencia contra las mujeres en Honduras – 2023.” https://derechosdelamujer.org/boletin-anual-violencia-contra-las-mujeres-en-honduras-2023/

Centro de Derechos de Mujeres. 2024. “https://derechosdelamujer.org/programa-investigacion-comunicacion-feminista/.”

Centro de Derechos de Mujeres. 2024. “COMUNICADO: HONDURAS, EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA SER MUJER EN AMÉRICA LATINA.” https://derechosdelamujer.org/comunicado-honduras-el-pais-mas-peligroso-para-ser-mujer-en-america-latina/.

Centro de Derechos de Mujeres. 2025. “Violencia femicida en Honduras: Resumen anual 2024.” https://derechosdelamujer.org/violencia-femicida-en-honduras-resumen-anual-2024/.

CIVICUS. 2024. “HONDURAS: ‘We live in a hostile country for women and their reproductive freedoms.'”
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/7027-honduras-we-live-in-a-hostile-country-for-women-and-their…

Congreso Nacional de Honduras. 2013. “Decreto No. 23-2013.” https://www.law.cornell.edu/gender-justice/location/honduras?page=1&utm.

Foro de Mujeres por la Vida. 2026. “Observatorio de Seguridad de las Mujeres.” https://www.forodemujeresporlavida.org/observatorio/.

Global Affairs Canada. 2020. “Honduras - Universal Periodic Review.” Global Affairs Canada. https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/upr-epu/honduras.aspx?lang=eng&utm_.

Herrera, Vienna. 2020. “Femicidios en Honduras: las mujeres que el Estado no escuchó.” https://contracorriente.red/2020/08/08/femicidios-en-honduras-las-mujeres-que-el-estado-no-escucho/.

IM-Defensoras. 2017. “We congratulate the Center for Women’s Rights (CDM) of Honduras on its 25th anniversary.” https://im-defensoras.org/en/2017/06/we-congratulate-the-center-for-womens-rights-cdm-of-honduras-on-its-25th-anniversary/.

IUDPAS-UNAH. 2023. “Infografía: Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, Enero–Diciembre 2023. Tegucigalpa: Instituto Universitario en Democracia.”” https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/15970-

infografia-muerte-violenta-de-mujeres-datos-preliminares-enero-a-diciembre-2023-ed16.

IUDPAS-UNAH. 2025. “Infografía: Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, Enero–Diciembre 2024. Tegucigalpa: Instituto Universitario en Democracia.” https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/18199-infografia-muerte-violenta-mujeres-ene-dic-2024-ed18?utm.

Naciones Unidas Honduras. 2023. “Iniciativa Spotlight realiza diálogo interreligioso e interinstitucional: Derechos de las Mujeres y Libertad Religiosa en un Estado Laico.” https://honduras.un.org/es/233809-iniciativa-spotlight-realiza-di%C3%A1logo-interreligioso-e-interinstitucional-derechos-de-las.

OHCR. 2026. “Universal Periodic Review - Honduras.” https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/hn-index?

UN Women. 2024. “Honduras Gender data gaps and country performance.” https://data.unwomen.org/country/honduras.

UN Women. 2024. “Honduras: Global Database on Violence against Women and Girls.” https://data.unwomen.org/global-database-on-violence-against-women/country-profile/Honduras/country-snapshot.

United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office. 2025. “Universal Periodic Review 50: UK Statement on Honduras.” https://www.gov.uk/government/news/universal-periodic-review-50-uk-statement-on-honduras?

UPR. 2025. “Universal Periodic Review 50: UK Statement on Honduras.” https://www.gov.uk/government/news/universal-periodic-review-50-uk-statement-on-honduras?

UUSC. 2024. “Mujeres in Action: Elevating Women’s Rights in Honduras.” https://www.uusc.org/mujeres-in-action-elevating-womens-rights-in-honduras/.

Artikel Jurnal

Dewi, Karina U., Hangga Fathana, and Masitoh Nur Rohma. 2023. “Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia.” *Journal of ASEAN Studies* 11 (2). https://doi.org/10.21512/jas.v11i2.8858.

Hanif, M. Rayhan, Linda D. Eriyanti, and Adhiningasih Prabhawati. 2025. “Addressing Femicide in Honduras through the Spotlight Initiative: A Study of the Implementation of the UN–EU Global Program.” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7. https://doi.org/10.32332/jsga.v7i02.art07.

Menjívar, Cecilia, and Shannon D. Walsh. 2017. “The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violencein Honduras.” *Cambridge Univesity Press*, (August). https://doi.org/10.25222/larr.73.

OHCHR. 2022. “CEDAW/C/HND/CO/9: Concluding observations on the ninth periodic report of Honduras.” https://docs.un.org/en/CEDAW/C/HND/CO/9.

Organization of American States. 1994. “Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women.” https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/belemdopara-english.pdf.

Plataforma EPU Mujeres. 2025. “Report on the State of Women’s Human Rights in Honduras: 4th Cycle of the Universal Periodic Review.” https://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2025/05/CDM-informe-EPU_EN.pdf.

United Nations Human Rights Council. 2020. “National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21.” https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/027/65/pdf/g2002765.pdf?OpenElement.

World Bank, ed. 2023. “GENDER-BASED VIOLENCE COUNTRY PROFILE: HONDURAS.” *World Bank Document*, 1. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099053023161529535/pdf/P1769790ecd944030af89085531f17f37b.pdf.

Buku

CEM-H. 2022. “Evaluación final del proyecto.” https://untf.unwomen.org/sites/default/files/2024-05/informe_de_evaluacion_externa_final_mayo_2024_compressed.pdf?utm_.

Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edited by Cheryl N. Poth. N.p.: SAGE Publications.

Inter-American Commission on Human Rights. 2024. “IACHR Releases Report on the Situation of Human Rights in Honduras.” https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2024/101.asp.

Keck, Margaret E, and Kathryn Sikkink. 1998. “Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics.” *Cornell University Press*.